



# **RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Jakarta, 2 September 2019

*Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*

ALOG  
STAKAAN

62  
NN  
R



Perpustakaan BNN

PERPUSTAKAAN	
TGL DITERIMA :	
No. INDUK :	5236
KODE BUKU :	362 BNN R/narkotika
	BNN

**KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2019**

---

- YTH. - PIMPINAN KOMISI III DPR – RI,  
- ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN  
- PARA HADIRIN SEKALIAN.

***ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WABARAKATUH.  
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.***

PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS PERKENAN-NYA KITA DAPAT BERSAMA MELAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPR – RI SESUAI SURAT SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AG/14284/DPR RI/VIII/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 PERIHAL UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT.

**PIMPINAN, ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN HADIRIN SEKALIAN.**

SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DIGOLONGKAN DALAM KEJAHATAN LUAR BIASA (*EXTRAORDINARY CRIME*) DAN SERIUS (*SERIOUS CRIME*). TERLEBIH, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERSIFAT LINTAS NEGARA (*TRANSNASIONAL*) DAN TERORGANISIR (*ORGANIZED CRIME*) SEHINGGA MENJADI ANCAMAN NYATA YANG MEMBUTUHKAN PENANGANAN SERIUS DAN MENDESAK.

PILAR VISI INDONESIA 2045 MENEGASKAN BAHWA SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DAN KETAHANAN NASIONAL MERUPAKAN HAL YANG SANGAT ESENSIAL DAN HARUS DIPERHATIKAN SECARA SERIUS. ANCAMAN BAHAYA NARKOTIKA PADA TAHUN 2045 DIPROYEKSIKAN AKAN MENINGKAT, DI MANA PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIPROYEKSIKAN SEBESAR 4,6% ATAU SEKITAR 8,6 JUTA PENDUDUK DARI PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK PADA TAHUN TERSEBUT SEBANYAK 318,7 JUTA JIWA. MELIHAT ANCAMAN TERSEBUT, BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN) SEBAGAI *LEADING SECTOR* PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TELAH MENETAPKAN BERBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN ANGKA PREVALENSI SEBESAR 1,02% PADA TAHUN 2045 YANG TERTUANG DALAM *GRAND DESIGN* BNN 2045.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AKAN MENCIPTAKAN CELAH BAGI PELAKU KEJAHATAN UNTUK MEMPRODUKSI ATAUPUN MENGEDARKAN NARKOTIKA DENGAN LEBIH MUDAH, MURAH, DAN TIDAK TERDETEKSI. FAKTA NYATA DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ADALAH SEMAKIN BANYAKNYA DITEMUKAN NARKOTIKA JENIS BARU ATAU *NEW PHYSICOACTIVE SUBSTANCES* (NPS) YANG MASUK KE INDONESIA. JUMLAH SAAT INI TELAH TERIDENTIFIKASI 74 NPS DARI 839 NPS DI DUNIA YANG MASUK KE INDONESIA, 66 DI ANTARANYA TELAH MASUK DALAM DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 50 TAHUN 2018, SEDANGKAN 8 (DELAPAN) NPS BELUM DIATUR DALAM LAMPIRAN TERSEBUT. PERKEMBANGAN NPS MENCIPTAKAN CELAH BAGI KEJAHATAN DIKARENAKAN BANYAK NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DIATUR OLEH HUKUM.

*TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (TOC) MELIHAT BANYAK POTENSI ATAU PELUANG INDONESIA SEBAGAI TARGET PEMASARAN YANG PALING MENJANJIKAN. DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PEMERINTAH MASIH BANYAK MEMILIKI PERMASALAHAN SECARA POLITIK DAN SISTEM HUKUM. KEBERADAAN SATUAN KERJA BNN BARU MENCAKUP 28,7% DARI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. KEBERPIHAKAN PEMERINTAH YANG MASIH LEMAH DALAM PENANGANAN NARKOTIKA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN TERORISME. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG LEMAH DIKARENAKAN EGO SEKTORAL DAN PERBEDAAN PARADIGMA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOTIKA, SERTA BELUM MELEMBAGANYA NARKOTIKA SEBAGAI ISU DARURAT NASIONAL SEHINGGA PERILAKU KEBIJAKAN PEMERINTAH BELUM MENUNJUKKAN KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI PRIORITAS UTAMA.

ISU PERANG STRATEGIS UNTUK MENGHANCURKAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA BUKAN SEKEDAR ISU SEMATA, AKAN TETAPI SEBUAH FAKTA YANG AKAN DI HADAPI OLEH BANGSA INDONESIA KEDEPAN.

BONUS DEMOGRAFI AKAN MENJADI ANCAMAN JIKA KITA TIDAK BERHASIL MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MULAI DARI SEKARANG.

#### **PIMPINAN, ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN HADIRIN SEKALIAN.**

SECARA GARIS BESAR CAPAIAN OPERASIONAL BNN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK P4GN SEJAK PERIODE TAHUN 2015 – JUNI 2019 DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

##### **1. LAJU PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

DAMPAK BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG SANGAT MERUGIKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MENDORONG PEMERINTAH MELALUI BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK LEBIH FOKUS MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA. ADAPUN TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019 DAN TERTUANG DALAM RKP ADALAH TERKENDALINYA LAJU PENINGKATAN PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBESAR 0,03% SETIAP TAHUN. BNN TELAH BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM MELAKUKAN PENELITIAN LAJU PREVALENSI.

LAJU PREVALENSI SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN HASIL SURVEI TAHUN 2008 S/D TAHUN 2011 ADALAH SEBESAR +0,24%, TAHUN 2011 S/D TAHUN 2014 ADALAH SEBESAR -0,05%, DAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2017 ADALAH SEBESAR -0,41%.

##### **2. JUMLAH JARINGAN SINDIKAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERUNGKAP**

KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA **JUMLAH JARINGAN SINDIKAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERUNGKAP**, DIDUKUNG OLEH FAKTOR-FAKTOR: *PERTAMA*, TERJALINNYA KERJASAMA YANG BAIK ANTAR PENEGAK HUKUM, BAIK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI, DALAM PERTUKARAN INFORMASI JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA; *KEDUA*, DUKUNGAN TEKNOLOGI INTELIJEN DALAM

AKTIVITAS PENGUNGKAPAN JARINGAN. BNN DALAM MEMUTUS DAN MENGGAGALKAN PASOKAN NARKOTIKA YANG AKAN DIPASARKAN DI INDONESIA BERPOTENSI MENYELAMATKAN ANAK BANGSA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. DENGAN ASUMSI DARI KEBIASAAN PEMAKAI/PENGGUNA SHABU BAHWA 1 GRAM DAPAT DIKONSUMSI OLEH 10 ORANG, MAKA PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI SHABU SEBANYAK 3,4 TON BERPOTENSI MENYELAMATKAN 34 JUTA JIWA ANAK BANGSA. PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI 1,39 TON GANJA JUGA BERPOTENSI MENYELAMATKAN 1,39 JUTA JIWA ANAK BANGSA. JUMLAH JARINGAN YANG TERUNGKAP PADA TAHUN 2015 SEJUMLAH 20, TAHUN 2016 SEJUMLAH 31, TAHUN 2017 SEJUMLAH 33, TAHUN 2018 SEJUMLAH 33 DAN TAHUN 2019 HINGGA BULAN JUNI SEJUMLAH 24 JARINGAN YANG TERUNGKAP.

**3. JUMLAH ASET YANG DISITA DARI HASIL TPPU TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

PADA TAHUN 2018, SEBESAR 80% DARI 42 BERKAS P-21 KASUS TPPU MERUPAKAN HASIL PENGEMBANGAN PENGUNGKAPAN JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA MALAYSIA DAN TAIWAN SERTA SELEBIHNYA (20%) MERUPAKAN PENGEMBANGAN LAPORAN HASIL ANALISA (LHA) DARI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK). MODUS OPERANDI JARINGAN SINDIKAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGIAN BESAR DIJALANKAN MELALUI BISNIS MONEY CHANGER, EKSPOR-IMPOR FIKTIF, DAN PERUSAHAAN PENYALUR JASA TENAGA KERJA INDONESIA.

DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN JUNI 2019, BNN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYITAAN ASET TPPU MENCAPAI 676,6 M DENGAN 116 TERSANGKA, DAN DENGAN JUMLAH KASUS MENCAPAI 116 KASUS.

**4. JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI INTANSI PEMERINTAH DAN KOMPONEN MASYARAKAT YANG OPERASIONAL DAN MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

JUMLAH FASILITAS REHABILITASI YANG TELAH MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ADALAH FASILITAS

REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOBA YANG TELAH MELAKUKAN PELAYANAN REHABILITASI SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN BERSAMA OLEH BNN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SERTA PAKAR DAN PRAKTIISI REHABILITASI NARKOBA.

SEJAK TAHUN 2015 BNN TERUS MENINGKATKAN AKSES LAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN DENGAN MEMBENTUK KLINIK LAYANAN REHABILITASI DI BNNP DAN BNNK/KOTA DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA. TERCATAT HINGGA TAHUN 2019, TERDAPAT 179 KLINIK BNNP DAN BNNK/KOTA YANG MAMPU MEMBERIKAN LAYANAN REHABILITASI TERHADAP SEKITAR 10 RIBU PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PER TAHUN.

BNN JUGA TERUS MEMBERIKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TERHADAP LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA DAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT AGAR DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN REHABILITASI YANG OPTIMAL. PADA TAHUN 2018 TERCATAT SEBANYAK 167 RUMAH SAKIT, 229 PUSKESMAS, DAN 289 LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT MEMILIKI KERJA SAMA DUKUNGAN LAYANAN REHABILITASI DENGAN BNN. SECARA KAPASITAS KESELURUHAN, LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT MAMPU MELAYANI SEKITAR 6 RIBU PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PER TAHUN.

#### **5. JUMLAH PENYALAH GUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOBA YANG PULIH**

JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PECANDU NARKOBA YANG PULIH ADALAH JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PECANDU NARKOBA YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI LAYANAN REHABILITASI BERKELANJUTAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN NARKOBA KEMBALI DENGAN JANGKA WAKTU KURANG LEBIH 1 TAHUN PERIODE LAYANAN, MELIPUTI LAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU SOSIAL SELAMA 2-6 BULAN, LAYANAN PASCAREHABILITASI RAWAT JALAN/RAWAT INAP SELAMA 2 BULAN, DAN RAWAT LANJUT SELAMA 4 BULAN.

JUMLAH PENYALAH GUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOBA YANG PULIH PADA TAHUN 2015 BERJUMLAH 4.973, TAHUN 2016 BERJUMLAH 9.423, TAHUN 2017 BERJUMLAH 7.752, TAHUN 2018 BERJUMLAH 2.660 PECANDU.

#### 6. INDEKS KEMANDIRIAN MASYARAKAT (IKM)

BNN BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MELUNCURKAN PROGRAM UNGGULAN, YAITU *ALTERNATIVE DEVELOPMENT (AD)* UNTUK MENGGANTI TANAMAN NARKOTIKA DAN MENGUBAH PROFESI PENANAM GANJA MENJADI PETANI DALAM PRODUKSI UNGGULAN. PROGRAM INI DIKLAIM TELAH BERHASIL DI BERBAGAI NEGARA PENGHASIL TANAMAN NARKOTIKA. MELALUI AD, BNN, KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA, DAN KOMPONEN BANGSA DIAJAK MELAKUKAN SINERGI DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA, MENEGAKKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN, SERTA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN MENGGAGAS TERBANGUNNYA AGROWISATA DI PROVINSI ACEH.

SASARAN STRATEGIS DARI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADALAH ***TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN P4GN.*** ADAPUN ARAH DARI SASARAN STRATEGIS DI ATAS ADALAH MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PARTISIPASI ATAU PERAN SERTA AKTIF DALAM INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN TERCIPTA SUATU KONDISI ***MENINGKATNYA KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN P4GN.*** UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGIS TERSEBUT DI ATAS, DIUKUR DENGAN INDIKATOR KINERJA ***INDEKS KEMANDIRIAN MASYARAKAT (IKM)*** BERSKALA 3,1. ***INDEKS KEMANDIRIAN MASYARAKAT (IKM)*** DALAM PELAKSANAAN P4GN ADALAH AKUMULASI JUMLAH INDEKS (INDIKATOR) DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM P4GN YANG DILAKUKAN OLEH PEGIAT ANTI NARKOTIKA SECARA MANDIRI DI LINGKUNGANNYA SETELAH DITINGKATKAN KEMAMPUANNYA OLEH BNN.

## **7. JUMLAH LEMBAGA YANG RESPONSIF SETELAH DIADVOKASI**

PADA TAHUN 2017, BNN TELAH MENYUSUN ALAT UKUR KETAHANAN DIRI ANTI NARKOBA YANG SECARA SPESIFIK BERFUNGSI UNTUK MENGUKUR DAYA TAHAN MASYARAKAT TERHADAP DORONGAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA. ALAT UKUR KETAHANAN DIRI ANTI NARKOBA INI KEMUDIAN DISEBUT DENGAN *ANTI DRUG SCALE (ADS)*. ALAT UKUR INI DISUSUN MELALUI SERANGKAIAN PROSES KAJIAN ILMIAH DENGAN MELIBATKAN PAKAR PSIKOLOGI DAN PAKAR PENGUKURAN PSIKOLOGI DAN STATISTIKA.

JUMLAH LEMBAGA YANG RESPONSIF SETELAH DILAKUKAN ADVOKASI PADA TAHUN 2016 MENCAPAI 1.728, TAHUN 2017 MENCAPAI 1.200 TAHUN 2018 MENCAPAI 913, DAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN JUNI MENCAPAI 229.

## **8. NARKOTIKA JENIS BARU YANG DITEMUKAN**

DALAM HAL KELABORATORIUMAN, SELAIN NARKOBA YANG TELAH DIKENAL SELAMA INI SEPERTI GANJA, HEROIN DAN *AMPHETAMINE TYPE STIMULANT (ATS)* BERKEMBANG PULA PENYALAHGUNAAN TERHADAP *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (NPS)*, DALAM LINGKUP GLOBAL, BERDASARKAN LAPORAN *UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)* DALAM *WORLD DRUG REPORT, 2018*, BAHWA PEREDARAN NPS DI DUNIA (TAHUN 2009-2017) ADALAH BERJUMLAH 803 ZAT DAN TERJADI PENINGKATAN SETIAP TAHUNNYA YAITU DARI SEMULA PADA TAHUN 2009 HANYA BERJUMLAH 126 ZAT, KEMUDIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016, 106 NEGARA MELAPORKAN TERDAPAT 739 ZAT.

SEMENTARA YANG TELAH TERDETEKSI DISALAHGUNAKAN DI INDONESIA SEBANYAK 74 JENIS DAN JUMLAH NPS YANG TELAH DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SEBANYAK 66 JENIS, MENURUT PERMENKES NO. 50 TAHUN 2018.

## **9. JUMLAH PRODUK HUKUM DAN KERJA SAMA**

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BNN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA DALAM PASAL 25 HURUF C PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL YAITU: PENYUSUNAN, PENGKAJIAN, DAN PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PRODUK HUKUM BNN YANG DIHASILKAN DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MASYARAKAT DAPAT MENERIMA MANFAAT SECARA LANGSUNG DARI PRODUK HUKUM YANG TELAH DISUSUN. PRODUK HUKUM DAN KERJASAMA YANG DIHASILKAN PADA TAHUN 2015 MENCAPAI 10, TAHUN 2016 MENCAPAI 19, TAHUN 2017 MENCAPAI 23, TAHUN 2018 MENCAPAI 24.

## **10. PERMASALAHAN DAN KENDALA DALAM P4GN**

### **A. PERMASALAHAN**

- 1) KEBIJAKAN DI BEBERAPA NEGARA TETANGGA YANG SANGAT TEGAS DAN KERAS TERHADAP PARA SINDIKAT NARKOTIKA BERIMPLIKASI PADA PERGERAKAN ANCAMAN SINDIKAT NARKOTIKA YANG MENGARAH KE INDONESIA.
- 2) KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA YANG TERBUKA MENJADI "SURGA" BAGI PARA SINDIKAT NARKOTIKA DALAM MENYELUNDUPKAN NARKOTIKA, TERUTAMA MELALUI JALUR SELAT MALAKA.
- 3) BERDASARKAN ANALISIS BNN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DIUNGKAP SELALU MENGARAH KEPADA PARA PENGHUNI LAPAS.
- 4) PARA BANDAR NARKOTIKA MEMBELI INTEGRITAS PARA PENYELENGGARA NEGARA/PENEGAK HUKUM.
- 5) PERKEMBANGAN NARKOTIKA JENIS BARU (NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE) YANG DIKEMAS DALAM BERBAGAI BENTUK SEPERTI PERMEN, MAKANAN RINGAN, SUPLEMEN, OBAT KUAT, DLL YANG SEMAKIN SULIT DIIDENTIFIKASI.
- 6) MEREBAKNYA FENOMENA NARKOTIKA MASUK KAMPUNG DENGAN PENGGUNANYA KALANGAN PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA (LURAH, SEKDES).
- 7) FENOMENA STRATEGI PERANG ASIMETRIS YANG DIMAINKAN OLEH NEGARA-NEGARA ASING MELALUI "OPERASI CANDU" YANG BERTUJUAN MELEMAHKAN ATAU MENGHANCURKAN GENERASI DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

### **B. KENDALA**

- 1) PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA BELUM DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, SECARA MASSIF DAN KOMPREHENSIF KEPADA SEGENAP LAPISAN MASYARAKAT.

- 2) MASIH KUATNYA *MIND SET* BAHWA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA HARUS DIJAUHI DAN MASIH RENDAHNYA KESADARAN MELAPORKAN DIRI KE IPWL (INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR) UNTUK MENDAPATKAN PERAWATAN.
- 3) FASILITAS REHABILITASI MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SANGAT TERBATAS SEHINGGA PARA PECANDU NARKOTIKA YANG AKAN MENJALANI REHABILITASI ATAU PEMULIHAN HARUS MENUNGGU (*WAITING LIST*).
- 4) ALAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIMILIKI BELUM DAPAT MENGIMBANGI LAJU PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIGUNAKAN OLEH PARA PELAKU SINDIKAT SEHINGGA TIDAK SEMUA INFORMASI JARINGAN MAUPUN KEGIATAN TRANSAKSI DAPAT TERDETEKSI.
- 5) ASSET TPPU HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA BELUM DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK Mendukung OPERASIONAL P4GN.
- 6) BELUM EFEKTIFNYA SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA, DUNIA USAHA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN P4GN.
- 7) BELUM TERPENUHINYA PASUKAN K-9 DAN SARANA PENUNJANG SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.
- 8) BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN NEGARA-NEGARA LAIN UNTUK MEMUTUS JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAHKAN SUDAH ADA NEGARA YANG MELEGALKAN TANAMAN NARKOTIKA.
- 9) APARAT LAPAS DIDUGA/TERINDIKASI MEMBERIKAN KEMUDAHAN ATAU KELELUASAAN PARA BANDAR DAN PENGEDAR YANG ADA DI LAPAS UNTUK MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LAPAS DAN MENGENDALIKAN JARINGANNYA.

## **11. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN KENDALA**

### **A. ARAH KEBIJAKAN BNN**

- 1) PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOTIKA SECARA SEIMBANG ANTARA *DEMAND REDUCTION* DAN *SUPPLY REDUCTION*.
- 2) MENGEMBANGKAN BERBAGAI UPAYA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOTIKA SECARA HOLISTIK, INTEGRAL, DAN BERKELANJUTAN.
- 3) MENGEDEPANKAN PROFESIONALISME, DEDIKASI, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOTIKA.

## B. STRATEGI BNN

STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK MELAKSANAKAN ARAH KEBIJAKAN TERSEBUT ADALAH:

- 1) MENGEKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI INFORMASI P4GN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT.
- 2) MENUMBUHKEMBANGKAN KEPEDULIAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN P4GN.
- 3) MENGEMBANGKAN AKSES LAYANAN REHABILITASI PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN.
- 4) MENGUNGKAP JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA DAN MENYITA SELURUH ASET TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA.
- 5) MENJALIN KEMITRAAN YANG HARMONIS DAN SINERGIS DENGAN BERBAGAI KOMPONEN BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN P4GN.
- 6) MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI YANG MENJUNJUNG TINGGI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

### PIMPINAN, ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN HADIRIN SEKALIAN.

PADA KESEMPATAN INI DISAMPAIKAN BAHWA PAGU ANGGARAN BNN TAHUN 2020 SEBAGAIMANA SURAT BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NOMOR : S-557.1/MK.02/ 2019 DAN B.432/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2019 TANGGAL 22 JULI 2019 PERIHAL PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PENYELESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RKA-K/L) TAHUN ANGGARAN 2020 SEJUMLAH RP1.630.750.020.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA DUA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN RINCIAN :

NO.	KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)
1.	066.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA	1.029.028.993.000

2.	066.01.06	PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	601.721.027.000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN BNN TA. 2020</b>			<b>1.630.750.020.000</b>

SEBAGAIMANA MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH KHUSUSNYA SEBAGAI BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN TA. 2020, TELAH DILAKUKAN PENAJAMAN DAN *REFOCUSING* TERHADAP ANGGARAN TERSEBUT DAN DITUANGKAN DALAM DOKUMEN RKA-K/L BNN TA. 2020 DAN SUDAH DITELAAH BERSAMA OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN DAN BAPPENAS.

DARI TOTAL ANGGARAN TERSEBUT SEBAGIAN DIALOKASIKAN UNTUK MENDANAI PROYEK PRIORITAS NASIONAL BNN TA. 2020, SEBAGAI BERIKUT:

NO.	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	TARGET	ALOKASI (RP)
1.	HASIL KAJIAN DESAIN STRATEGI "ACTIVE DEFENSE" DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	1 LAPORAN	4.000.000.000
2.	DESA YANG MEMILIKI ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DARI DANA DESA (DESA BERSIH NARKOBA)	173 DESA	3.500.000.000
3.	KAWASAN RAWAN KULTIVASI, PRODUKSI, PENYELUNDUPAN, PEREDARAN GELAP, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG DIINTERVENSI PROGRAM ALTERNATIVE DEVELOPMENT	6 KAWASAN	6.250.000.000
4.	HASIL KAJIAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA NARKOTIKA	1 LAPORAN	2.000.000.000

NO.	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	TARGET	ALOKASI (RP)
5.	PETUGAS AGEN (PENDAMPING) PEMULIHAN BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	200 ORANG	2.400.000.000
6.	FASILITAS LAYANAN REHABILITASI BERBASIS KOMPONEN MASYARAKAT YANG MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	10 FASILITAS	1.650.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>19.800.000.000</b>

**PIMPINAN, ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN HADIRIN SEKALIAN.**

DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA TANTANGAN YANG DIHADAPI BNN SELAIN BEBAN TUGAS LAIN YANG DIEMBAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH DARI WAKTU KE WAKTU JUGA MENUNTUT PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN YANG OPTIMAL NAMUN BELUM DIIMBANGI DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI. HAL INI DAPAT TERGAMBAR DARI BESARAN ANGGARAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 SEBESAR RP1.630.750.020.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA DUA PULUH RIBU RUPIAH).

TOTAL ANGGARAN TERSEBUT LEBIH BESAR RP50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) DIBANDING PAGU INDIKATIF TA. 2020 (RP1.580.750.020.000,-) YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENGADAAN PERALATAN INTELIJEN *DIRECT FINDER MODULE* GUNA Mendukung KINERJA JAJARAN BIDANG PEMBERANTASAN. TAMBAHAN TERSEBUT MASIH JAUH DARI PERMINTAAN AWAL SEBAGAIMANA SURAT KEPALA BNN NOMOR: B/2044/VI/KA/PR.02/2019/BNN TANGGAL 18 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN KEBUTUHAN ANGGARAN BNN TA. 2020, DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA BERIKUT:

NO.	KEBUTUHAN	ANGGARAN (RP)
1.	PEMBANGUNAN GEDUNG BNN PUSAT TAHAP I	11.000.000.000
2.	PEMBANGUNAN GEDUNG BNN PROVINSI	90.000.000.000
3.	PEMBANGUNAN GEDUNG BNN KABUPATEN/KOTA	65.000.000.000
4.	UPGRADING DF MODULE 2300 TDD - INTELIJEN	15.000.000.000
5.	UPGRADING DF MODULE 2300 TDD - PENINDAKAN/PENGEJARAN	59.325.000.000
6.	PENGADAAN SOFTWARE ANALISA INTELIJEN (SAI)	20.000.000.000
7.	PENGADAAN DIRECT FINDER	80.000.000.000
8.	PENGADAAN VIDEO CONFERENCE	23.457.482.000
9.	PENGEMBANGAN TIK (CBT, E-OFFICE)	16.000.000.000
10.	PENGADAAN ALAT OLAH DATA (NOTE BOOK)	18.987.600.000
11.	PENGADAAN K-9	20.500.000.000
12.	PEMBANGUNAN POS KOMANDO INTERDIKSI TERPADU	30.000.000.000
13.	OPERASIONAL 7 POS INTERDIKSI TERPADU	5.091.648.000
14.	MOBIL OPERASIONAL SCREENING DAN INTERVENSI LAPANGAN (SIL)	5.000.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>459.361.730.000</b>

DALAM KESEMPATAN INI BNN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH TELAH DIBERIKAN TAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR 50 MILIAR PADA PAGU ANGGARAN TAHUN 2020. NAMUN DEMIKIAN DENGAN SEIJIN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI YANG TERHORMAT, BNN MENGAJUKAN KEMBALI TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2020 SEBESAR **RP409.361.730.000,- (EMPAT RATUS SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)**, UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN YANG BELUM DISETUJUI DENGAN HARAPAN DAPAT DIPENUHI PADA PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020.

**PIMPINAN, ANGGOTA KOMISI III DPR – RI, DAN HADIRIN SEKALIAN.**

DEMIKIAN PAPARAN KAMI SEMOGA MEMPEROLEH TANGGAPAN, MASUKAN, DAN DUKUNGAN DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI KEPADA BNN AGAR MAMPU MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA GUNA OPTIMALISASI HASIL KINERJA BNN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN).

ATAS PERHATIAN BAPAK/IBU KAMI MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH.

**WASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WABARAKATUH.**

**JAKARTA, 02 SEPTEMBER 2019**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  


**DRS. HERU WINARKO, S.H.**

Perpustakaan BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Telp. (021) 80871566, 80871567

Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871593

Call Center BNN : 184 / 021-80880011

SMS Center BNN : 081-221-675-675

Website BNN : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

E-mail BNN : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id)

